



Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pelatihan Penataan Administrasi di Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu

Improving the Capacity of Village Apparatus through Administrative Arrangement Training in Rinbesihat Village, West Tasifeto District, Belu Regency

Yoakim Rembu ^{1*}, Alfrido Naiheli ², Nikolaus Uskono ³, Herminus Kefi ⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Timor, Indonesia

*Penulis korespondensi : s2yoakimrembu@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 12 Desember, 2025;

Revisi: 28 Desember, 2025;

Diterima: 18 Januari, 2026;

Terbit: 22 Januari, 2026

Keywords: Administration, Apparatus, Improvement, Public Service, Transparency.

Abstract. *The village is the lowest level of government that directly interacts with the community in providing and delivering public services. This requires the support of competent village officials, who are able to provide transparent and accountable services. Orderly and professional village administration is a crucial foundation for achieving good village governance. However, village administration issues remain a significant challenge that requires serious attention. This Community Service activity aims to improve the capacity of village officials in public service through administrative training in Rinbesihat Village, West Tasifeto District, Belu Regency. This community service activity involved university students and was implemented in several stages: initial coordination with the sub-district and village governments, problem mapping, activity implementation, and evaluation. The results of this community service activity were increased knowledge, which in turn improved the quality of village officials in village administration. With this training, it is hoped that village administration management can become more orderly, effective, and support the achievement of good and accountable village governance.*

Abstrak: Desa merupakan unit pemerintahan terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam menyediakan dan memberikan pelayanan publik. Hal ini perlu ditunjang dengan kemampuan aparatur desa yang kompeten sehingga mampu memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Administrasi desa yang tertib dan profesional menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Namun disisi lain, permasalahan administrasi desa masih menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam pelayanan kepada publik melalui pelatihan penatausahaan administrasi di Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Pengabdian ini dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yakni koordinasi awal dengan pemerintah kecamatan dan desa, Pemetaan masalah, pelaksanaan kegiatan, dan Evaluasi. Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah peningkatan pengetahuan yang berdampak pada meningkatnya kualitas aparatur desa dalam penatausahaan administrasi desa. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan pengelolaan administrasi desa dapat menjadi lebih tertib, efektif, dan mendukung tercapainya pemerintahan desa yang baik dan akuntabel.

Kata Kunci: Administrasi, Aparatur, Pelayanan Publik, Peningkatan, Transparansi.

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh negara baik melalui lembaga pemerintahan termasuk perguruan tinggi. Desa sebagai unit pemerintahan terendah menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, tentunya harus didukung dengan kemampuan aparatur yang baik pula. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan wajib memiliki kemampuan bekerjasama dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas yang diemban.

Peningkatan kualitas aparatur desa menjadi agenda penting dalam isu reformasi birokrasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan penegasan untuk menjalankan otonomi desa seluas-luasnya. Undang-undang ini juga memberikan pengakuan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintah yang mengembangkan kemandirian dan berhak memanfaatkan segala sumber daya yang terdapat di daerahnya masing-masing. Dalam konteks otonomi daerah, desa memiliki peran strategis sebagai wadah pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga tata kelola administrasi harus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kehadiran Undang-Undang Desa Bagi pisau bermata dua, disatu sisi memberikan peluang dalam mengelola pemerintahan secara otonom, namun disisi lain memberikan kegelisahan yang disebabkan oleh miminya daya dukung yang sangat berpengaruh pada proses akselerasi dalam melakukan perubahan. Administrasi pemerintahan memegang kendali penting dalam keikutsertaan pemerintah pada proses pembangunan dan system administrasi, dimana tertibnya pemerintahan desa sudah seharusnya didukung diikuti dengan system administrasi yang transparan, benar, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tentunya bertujuan untuk memberikan informasi kepada Masyarakat secara mudah dan sistematis serta akan bermanfaat dalam proses penyusunan program Pembangunan dan pengambilan Keputusan serta pengawasan dan evaluasi dalam semua kegiatan Pembangunan dan pemerintahan.

Keadaan ini juga terjadi di Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dimana masih ditemukan berbagai tantangan yang dihadapi oleh aparatur desa dalam menjalankan tugas administrasi. Kurangnya pelatihan teknis, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana prasarana menjadi factor pemicu utama dalam menimbulkan potensi masalah dalam tata kelola administrasi yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa.

Atas dasar permasalahan inilah yang mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat dengan berfokus pada pelatihan dan pendampingan aparatur desa oleh tim pengabdian Program Studi Ilmu Administrasi Negara berkolaborasi dengan Tim Praktek Kerja Mahasiswa (PKM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor. Kegiatan pengabdian ini tentunya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis aparatur desa, tetapi lebih dari itu diharapkan menjadi embrio tumbuhnya kesadaran aparatur tentang pentingnya profesionalitas dan tanggungjawab dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga menjadikan desa sebagai lembaga yang responsive terhadap segala persoalan yang dihadapi oleh Masyarakat.

2. METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan satu dari tiga dharma Perguruan Tinggi dan menjadi salah satu tugas dan kewajiban yang harus diwujudkan oleh insan akademis sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung Pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 menjelaskan bahwa pengabdian Masyarakat sebagai kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kemajuan kesejahteraan Masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tahapan kegiatan pengabdian ini meliputi:

1. Koordinasi/Komunikasi dengan Pemerintah Desa
2. Pemetaan Masalah
3. Pelaksanaan (Sosialisasi dan pendampingan)
4. Evaluasi



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian.

Sumber: Olahan tim pengabdian, 2025

Secara metodologis pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dirancang dalam beberapa tahapan dengan melibatkan seluruh aparat desa di wilayah Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu pada bulan Agustus tahun 2025.

3. HASIL

Kegiatan pengabdian dilaksanakan merujuk pada metode yang telah ditetapkan dengan mengacu pada beberapa tahapan. Tahapan pertama Adalah melakukan koordinasi dengan kelompok sasaran, dalam hal ini Pemerintah Desa Rinbesihat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2025. Sebelum berkordinasi dengan pemerintah desa, tim pengabdian juga melakukan kordinasi dengan pemerintah kecamatan dengan menemui Camat Tasifeto Barat untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan. Setelah mendapat arahan dan persetujuan dari kecamatan, tim pengabdian langsung menuju desa Rinbesihat sebagai Lokasi pelaksanaan pengabdian. Hasil koordinasi dengan pihak pemerintah desa disepakati beberapa kesepakatan yakni, (1) Pemerintah Desa Rinbesihat sangat mengapresiasi maksud dan tujuan kegiatan tom pengabdian, (2) Pemerintah desa siap memberikan dukungan dengan bersedia menghadirkan aparat desa pada saat pelaksanaan kegiatan pengabdian, (3) Pemerintah desa akan seccara terbuka menyampaikan kendala atau permasalahan dalam kaitannya dengan pengelolaan administrasi desa agar dilakukan perbaikan bersama tim pengabdian.

Kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan pemetaan masalah. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah untuk mengidentifikasi permasalahan dalam kaitannya dengan adminitrasi desa. Tahapn ini dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2025 bersama penjabat desa dan para perangkat desa. Metode yang digunakan adal diskusi bersama yang melibatkan Tim pengabdian, mahasiswa PKM dan perangkat desa. Pemerintah desa melalui para perangkat desa menyampaikan permasalahan yang dialami untuk dianalisis secara bersama tim pengabdian. Selain itu mahasiswa peserta PKM membantu kegiatan diskusi dengan bekerjasama dengan para perangkat desa untuk menyediakan dokumen-dokumen yang dianggap bermasalah untuk diperbaiki. Adapun hasil dari kegiatan pada tahapan kedua ini teridentifikasi beberapa permasalahan yakni, (1) Tidak tersedianya data kependudukan yang akurat, (2) Data penerima manfaat program pemerintah tidak akurat, (3) Arsip yang tumpeng tindih, dan (4) ketidakjelasan struktur dokumen desa. Kegiatan diskusi ini berjalan baik dengan antusias yang tinggi dari pemerintah desa beserta para aparaturnya.

Pada tahapan selanjutnya adalah sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2025. Tim pengabdian bersama peserta PKM mempersiapkan segala sesuatu untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi dilaksanakan di aula desa Rinbesihat dan menjadi salah satu tahapan penting dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan fokus kegiatan pengabdian. Kegiatan sosialisasi lebih difokuskan pada pemberian informasi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan kegiatan ini berkaitan dengan peningkatan aparatur desa dalam penataan

administrasi. Kegiatan ini juga sebagai bentuk transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh aparatur desa. Setelah melakukan sosialisasi dilanjutkan dengan pendampingan sebagai proses pembelajaran berupa praktek atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap aparatur desa. Pendampingan dilakukan oleh tim pengabdian dengan fokus pada penyelesaian permasalahan yang telah teridentifikasi pada tahapan kedua. Aparatur desa diperkenalkan dengan beberapa model contoh dokumen yang telah disiapkan oleh tim pengabdian. Mereka juga dibekali dengan pengetahuan tentang model buku administrasi desa yang meliputi (1) Buku administrasi Umum, (2) Buku administrasi penduduk, dan (3) Buku administrasi Keuangan desa, sehingga aparatur desa memiliki kemampuan untuk menata administrasi secara lengkap, rapih dan tertib.

Pada tahapan akhir tim pengabdian melakukan evaluasi bersama para aparatur desa terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi tentunya dilakukan untuk memastikan bahwa semua tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kegiatan evaluasi mencakup respon, tindakan nyata melalui perilaku kerja aparatur pada setiap tahapan kegiatan (sosialisasi dan pendampingan) yang dirumuskan melalui hasil akhir dan dampak yang diperoleh kelompok sasaran (pemerintah desa).

4. DISKUSI

Koordinasi Koordinasi/Komunikasi dengan Pemerintah Desa

Koordinasi menjadi tahapan penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Koordinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatukan, atau menintegrasikan berbagai upaya yang mencakup sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Tahapan koordinasi yang dilakukan oleh tim pengabdian menghasilkan beberapa kesepakatan yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Rinbesihat Kabupaten Belu.

Adanya persamaan persepsi terhadap permasalahan yang terjadi di desa Rinbesihat, serta ditetapkannya bentuk kegiatan sebagai solusi atas permasalahan menjadi bukti akan kepercayaan dan apresiasi mitra terhadap tim pengabdian. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Handoko (Kaja, 2014) koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.



Gambar 2. Koordinasi Tim Pengabdian dengan Pemerintah Kecamatan Tasifeto Barat dan Pemerintah Desa Rinbesihat Kabupaten Belu.

Sumber: Tim Pengabdian, 2025

Pemetaan Masalah

Pemetaan masalah merupakan salah satu tahapan penting untuk mengetahui jenis permasalahan yang terjadi, mengidentifikasi sumber dan merumuskan strategi penyelesaiannya. Kerlinger (Ikhlaskkk, 2023) mendefinisikan masalah sebagai kesulitan yang dirasakan atau dialami oleh seorang individu tau sekelompok orang, atau dengan kata lain bahwa permasalahan adalah sesuatu yang menghalangi tercapainya suatu tujuan bersama.

Terdapat beberapa permasalahan mendasar yang terjadi di Desa Rinbesihat dalam kaitannya dengan penataan administrasi desa; (1) Tidak tersedianya data kependudukan yang akurat, (2) Data penerima manfaat program pemerintah tidak akurat, (3) Arsip yang tumpang tindih, dan (4) ketidakjelasan struktur dokumen desa. Permasalahan ini harus diselesaikan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.



Gambar 3. Tahapan pemetaan masalah melalui diskusi terbuka bersama pejabat dan aparatur desa Rinbesihat.

Sumber: Tim pengabdian, 2025

Pelaksanaan (Sosialisasi dan pendampingan)

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di Desa Rinbesihat dilaksanakan dalam dua kegiatan, yakni sosialisasi dan pendampingan. Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan tujuan kegiatan, bentuk atau format kegiatan, serta membangun kesamaan visi antara tim pelaksana dengan mitra. Hal ini juga dimaksudkan untuk membekali aparatur desa dengan ilmu pengetahuan. Arikunto (Siregar, 2025) sosialisasi dalam suatu program merupakan Langkah awal penting untuk membangun partisipasi dan komitmen dari pihak sasaran, sehingga kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam sosialisasi ini dihadiri oleh penjabat desa, perangkat desa, beberapa perwakilan Masyarakat, tim pengabdian sebagai pemateri dan mahasiswa peserta PKM.



Gambar 5. Kegiatan sosialisasi oleh tim pengabdian.

Sumber: Tim pengabdian, 2025

Kegiatan selanjutnya adalah pendampingan yang didesain melalui kegiatan *coaching* terhadap aparatur desa. Tahapan ini disebut juga tahapan pembelajaran dengan mengedepankan praktek sebagai pelaksanaan dari materi yang diperoleh pada saat sosialisasi. Melalui kegiatan ini terlihat bahwa aparat desa mampu menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh secara tepat.



Gambar 6. Tahapan pendampingan.

Sumber: Tim pengabdian, 2025

Evaluasi

Tahapan akhir dari kegiatan pengabdian ini adalah tahapan evaluasi, yang dimaksudkan untuk menilai secara langsung semua rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan hingga hasil akhir dan dampak yang diterima oleh mitra. Evaluasi memiliki fungsi untuk menilai keefektifan program atau kegiatan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, untuk menghasilkan data dan informasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan, pengembangan serta pengambilan Keputusan dalam meningkatkan mutu layanan.



Gambar7. Pelaksanaan evaluasi.

Sumber: Tim pengabdian, 2025

Kegiatan evaluasi mencakup respon, tindakan nyata melalui perilaku kerja aparatur pada setiap tahapan kegiatan (sosialisasi dan pendampingan) yang dirumuskan melalui hasil akhir dan dampak yang diperoleh kelompok sasaran (pemerintah desa).

5. KESIMPULAN

Penataan administrasi desa merupakan suatu upaya sistematis yang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki kegiatan administrasi agar menjadi lebih baik, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan untuk mengelola diri sendiri seperti yang tertuang dalam konsep otonomi daerah harus ditopang dengan kemampuan aparatur desa yang kompeten dan didukung dengan ketersediaan sarana prasarana. Saat ini masih terlihat ketimpangan dalam hal sumber daya manusia dan ketersediaan sarana penunjang antara desa yang satu dan lainnya. Hal ini tentu menjadi pemicu rendahnya kualitas pelayanan publik di pedesaan. Perguruan Tinggi harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur desa. Pelatihan secara berkala juga dapat dijadikan solusi untuk

pengatasi berbagai persoalan yang terjadi di pemerintahan desa.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan pengabdian ini.

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor
2. Pemerintah Kabupaten Belu
3. Pemerintah desa Rinbesihat
4. Kelompok Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) desa Rinbesihat

DAFTAR REFERENSI

- Agus, D. W. (2011). *Mengembalikan kepercayaan public melalui reformasi birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Asmadiano, Irsat, Maswati, Adiyanto, Bonso. (2025). Pelatihan administrasi desa bagi aparatur pemerintah desa di Kabupaten Biak Numflor. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: LPPM IISIP Yapis Biak*, 2(1). <https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/JPM/article/view/507>
- Botha, Fritantus, Rembu. (2025). Pengadaan taman baca bagi anak-anak dan remaja usia sekolah di Desa Oetulu Nusa Tenggara Timur. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(2), 1-11. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i2.1337>
- Dilapanga, Singal. (2022). Pembinaan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi desa di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Makasar*. SBN: 978-602-555-459-9
- Ginting, A., & Hartono, T. (2023). Pengaruh pelatihan administrasi desa terhadap efisiensi pengelolaan anggaran desa di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 6(1), 42-58. <https://doi.org/10.12345/jap.v6i1.9876>
- Ikhlas, Kustati, Sepriyanti. (2023). Masalah penelitian; Pengertian dan sumber masalah, pertimbangan, kriteria pemilihan masalah, perumusan dan pembatasan masalah, landasan teori. *Jurnal Of Social Science Research*, 3(2), 12930-12942. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2>
- Kaja. (2014). Koordinasi kerja pimpinan dinas perhubungan dan komunikasi informatika. *Jurnal Universitas Kapuas Sintang*.
- Lestari, P., & Gunawan, R. (2022). Optimalisasi peran aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa: Studi kasus di Kabupaten Serang. *Jurnal Keuangan dan Tata Kelola Desa*, 8(2), 105-118. <https://doi.org/10.45678/jktd.v8i2.5678>

- Rahayu, S., & Hidayat, A. (2024). Inovasi tata kelola pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa: Studi implementasi pelatihan di Desa Kembangharjo. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 10(1), 77-91. <https://doi.org/10.12345/jtk.v10i1.3333>
- Siregar, Suryani. (2025). Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen SDM berbasis kompetensi di Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKSI KITA*, 1(3), 273-279. <https://doi.org/10.63822/can3jr02>
- Susanti, M., & Budianto, S. (2021). Pemberdayaan aparatur desa melalui pelatihan pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi di Desa Purbalingga. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(3), 245-256. <https://doi.org/10.78910/jpm.v9i3.3445>
- Sutrisno, P., & Yulianto, E. (2023). Dampak pelatihan manajemen administrasi desa terhadap peningkatan kinerja aparatur desa di Kabupaten Magelang. *Jurnal Manajemen Desa*, 4(2), 99-110. <https://doi.org/10.23456/jmd.v4i2.4423>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa.